

Produk Usaha Mikro Kecil Menengah Lokal Hulu Sungai Selatan Diminati Pengunjung Indonesia Maju Expo 2024



Sumber gambar:

https://img.antarane.ws.com/cache/1200x800/2024/07/08/449949944_1585371028678343_27190696956_85259887_n.jpg.webp

Produk UMKM Lokal HSS diminati pengunjung Indonesia Maju Expo 2024 yang digelar di Assembly Hall Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC), mampu menarik minat ribuan masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia dan mancanegara.

Dinas Perdagangan dan Dekranasda Hulu Sungai Selatan (HSS) Kalimantan Selatan (Kalsel) yang ikut dalam kegiatan berskala nasional ini terbilang sukses mengikuti kegiatan yang berlangsung sejak 4-7 Juli 2024, dengan menampilkan produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM) lokal yang diminati pengunjung.

"Sejak stan expo dibuka pukul 8.00 hingga pukul 20.00 Wita, antusias pengunjung terus memadati stan kami, baik untuk melihat lihat hingga membeli produk yang dipajang," kata Kepala Dinas Perdagangan HSS Sudiono saat dikonfirmasi di Kandangan, Kabupaten HSS, Senin.

Dijelaskan dia, dari kegiatan ini bisa dilihat betapa ketatnya persaingan UMKM dan IKM di seluruh Indonesia, namun untuk produk lokal dari HSS, berhasil mendapat banyak peminat. Pihaknya termotivasi kedepannya agar semua produk UMKM dan IKM di HSS bisa lebih di tingkatkan, agar bisa lebih dikenal dan diminati hingga ke tingkat nasional dan internasional.

"Alhamdulillah, pada kegiatan ini kami dari HSS sukses menampilkan produk UMKM dan IKM, kemudian bersiap untuk mengikuti acara selanjutnya, yakni Apkasi Otonomi Expo di tempat yang sama pada 9-11 Juli 2024," terangnya.

Kepala Bidang Bina Perdagangan Disdag HSS Abdul Kodir menambahkan stan Dinas Perdagangan HSS diisi berbagai produk dan lokal UMKM dan IKM binaan Dekranasda HSS, terus mendapat minat pengunjung Indonesia Expo dan Forum 2024.

"Bahkan sejak dibuka pukul 8.00 WITA hingga pukul 20.30 WITA, jumlah pengunjung yang berkunjung ke stan kami tercatat mencapai ratusan orang," ungkapnya. Menurut dia, besarnya minat pengunjung ke stan diharapkan bisa terus memacu semangat pelaku UMKM dan IKM daerah, terus berinovasi serta meningkatkan kualitas dan kuantitas produk mereka. Hal ini karena terbukti produk dari HSS termasuk yang paling banyak dikunjungi, di antara ratusan stand dari berbagai provinsi di Indonesia.

Sementara itu, Fasilitator Promosi Dekranasda HSS sekaligus pengelola stan Dinas Perdagangan HSS Lasidi mengatakan di antara beberapa produk yang banyak dibeli oleh pengunjung ialah Kain Sasirangan. "Juga kerajinan anyaman Bambu, serta beberapa produk lainnya yang terlihat unik dan menarik hasil karya UMKM dan IKM kita di daerah," ujarnya.

Salah satu pengunjung dari Bandung Azzahra Humaira mengatakan mengaku senang bisa membeli produk lokal dari Kabupaten HSS. "Produknya sangat menarik untuk dipakai, semoga suatu saat saya berkesempatan berkunjung ke Kabupaten HSS untuk melihat langsung produksi UMKM dan IKM di sana," harapnya.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Selatan (HSS) mengikuti event Indonesia Maju Expo dan Forum 2024, yang digelar 4 sampai 7 Juli, di Assembly Hall, Balai Sidang, Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta. Pembukaan digelar Kamis (4/7/2024) turut dihadiri Kepala Badan Kesabangpol Kabupaten HSS Eko Harjidi Putra, Kepala Disnaker KUKMP, Siti Erma, serta Kepala Dinas Perdagangan Sudiono.

Produk yang ditampilkan di stan Kabupaten HSS terdiri kain sasirangan, kerajinan tangan berupa miniatur bangunan, aneka kuliner, sirup kayu manis, dan beberapa produk lokal lainnya.

Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten HSS Sudiono menuturkan, keikutsertaan ini diharapkan bisa lebih memperkenalkan produk produk lokal daerah ke tingkat Nasional.

Menurutnya, produk-produk yang ditampilkan dari hasil binaan Dinas Perdagangan dan Dekranasda HSS, tentu tidak kalah bersaing dengan produk lain dari luar Provinsi Kalsel. "Ini sebuah momentum untuk kita bisa tampil di tingkat Nasional, menampilkan hasil karya daerah kita sehingga bisa lebih dikenal," ujar Sudiono.

Event tersebut digelar Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), untuk mendukung produk lokal serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Lalu, mendukung secara strategis pemulihan ekonomi dan mendorong iklim perekonomian ekspor. Serta, membuka akses informasi serta sarana promosi potensi ekonomi, sosial, dan budaya yang dimiliki Indonesia.

Sekitar 100 peserta expo berasal dari berbagai sektor, seperti dari kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), swasta, lembaga non-pemerintahan, asosiasi, serta pelaku UMKM.

Indonesia Maju Expo 2024 tersebut, dari Provinsi Kalsel juga diikuti Kota Banjarmasin, dan Kabupaten Tanah Laut. Event dirangkai Procurement Network Forum, Seminar Bisnis Online dari Omsang, Digital Marketing Class, Talkshow terkait ekspor dan penyakit jantung, Lomba Tari Daerah, Penampilan Fashion Culture, Festival Sambal Nusantara, Atraksi K9 Badan Narkotika Nasional (BNN), juga ceramah yang mengundang Ustaz Hanan Attaki.

Sumber Berita

1. https://kalsel.antaranews.com/berita/420387/produk-umkm-lokal-hss-diminati-pengunjung-indonesia-maju-expo-2024?utm_source=antaranews&utm_medium=mobile&utm_campaign=related_news, Produk Usaha Mikro Kecil Menengah Lokal Hulu Sungai Selatan Diminati Pengunjung Indonesia Maju Expo 2024, (08/07/2024).
2. <https://kalimantanpost.com/2024/07/pemkab-hss-bawa-produk-lokal-andalan-ikuti-indonesia-maju-expo-2024/>, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Bawa Produk Lokal Andalan Ikuti Indonesia Maju Expo 2024, (09/07/2024).

Catatan:

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai

pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.

- Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, jenis Retribusi Daerah terdiri atas: Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Obyek Retribusi Daerah adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah.

- Selanjutnya, pada Pasal 88 regulasi yang sama berbunyi, jenis pelayanan yang merupakan obyek Retribusi Jasa Umum meliputi: Pelayanan kesehatan; Pelayanan kebersihan; Pelayanan parkir di tepi jalan umum; Pelayanan pasar; dan Pengendalian lalu lintas. Jenis pelayanan tersebut dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

- Sedangkan jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan obyek Retribusi Jasa Usaha meliputi: Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; Pelayanan jasa kepelabuhanan; Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.